
Bentuk Dan Mekanisme Pemberdayaan Oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Nuryanti

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Email: nuryantinyun@gmail.com

Subejo

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana UGM

Email: subejo@ugm.ac.id

Budi Guntoro

Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan UGM

Email: bguntoro@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI) was an organization which was formed for facilitating tobacco farmers. This association had been conducting various efforts on farmer empowerment. This research was aimed to described the forms and mechanism of tobacco farmer's empowerment developed by the APTI Temanggung to supported economic resilience's farmer;

This study used mixed research methods, with strategy of concurrent embedded (qualitative and quantitative method).

The research results showed that there were 4 (four) programs which were successfully established and implemented by APTI Temanggung, namely (a). the empowerment program of APTI Central Java chapter to took care of farmers' education, (b). Business Credit for Tobacco Farming (KUMPT) program, (c). mentoring, coaching and assisting tobacco farmers program, and (d). the main developmental program of APTI to advocated farmers about tobacco's regulation. All forms of empowerment done by APTI were facilitated by using different empowerment mechanism for each program.

Keywords: Tobacco's Farmer Association, Forms, Mechanism, Empowerment, Economic Resilience.

ABSTRAK

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) sebagai organisasi dengan tujuan untuk memfasilitasi petani tembakau dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan petani. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan bentuk dan mekanisme pemberdayaan petani tembakau yang dikembangkan oleh (APTI) Temanggung guna mendukung ketahanan ekonomi petani tembakau.

Penelitian ini menggunakan *mixed methods* dengan strategi embedded konkuren (kualitatif dan kuantitatif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang berhasil dibentuk dan dilaksanakan APTI Temanggung ada 4 (empat) yaitu (a) program pemberdayaan APTI DPD Jateng peduli pendidikan, (b) program Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), (c) program pembimbingan pembinaan dan pendampingan petani tembakau, dan (d) program pemberdayaan utama APTI adalah advokasi regulasi pertembakauan. Semua bentuk pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung adalah fasilitasi dengan mekanisme tiap program berbeda-beda.

Kata Kunci : Asosiasi Petani Tembakau, Bentuk, Mekanisme, Pemberdayaan, Ketahanan Ekonomi

PENGANTAR

Secara umum populasi petani Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti pada awal tahun 1990-an. Slamet (1995) melaporkan populasi petani Indonesia telah berubah menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun jumlah populasi petani menurun tetapi secara kualitas meningkat. Hal itu dapat diamati dari makin baiknya tingkat pendidikan, lebih mengenal kemajuan, meningkatnya harapan dan kebutuhan, serta keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang pertanian.

Namun seiring datangnya krisis keuangan pada tahun 1997 dan masa reformasi yang berjalan dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, petani Indonesia kembali mengalami masa stagnasi. Penyebab stagnasi tingkat kesejahteraan petani di Indonesia dipicu oleh banyak hal, mulai dari kebijakan tidak *pro* petani sampai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berubah menjadi lebih individualistik. Kondisi ini yang secara umum dialami oleh petani di Indonesia termasuk para petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Terkait dengan dinamika kehidupan petani tembakau, salah satu masalah penting terkait dengan kebijakan pemerintah yang dinilai oleh banyak kalangan kurang *pro* petani adalah disahkannya PP Tembakau Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Yang Mengandung Zat Adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. PP ini menyatakan tembakau sebagai zat tambahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Petani memandang regulasi baru dengan terbitnya PP Tembakau telah merugikan mereka karena semenjak dahulu tembakau hanya memiliki nilai ekonomi tinggi jika digunakan sebagai bahan utama rokok,

sehingga pemerintah dinilai berpihak pada satu kepentingan dan tidak memperhatikan kepentingan petani. Bahkan hal ini dilihat sebagai kecenderungan berpihak pemerintah terhadap kepentingan asing (Pemkab Temanggung, 2012).

Terlepas dari efek negatif rokok terhadap kesehatan, munculnya PP ini membuka kesempatan beredarnya rokok putih di pasaran Indonesia yang *notabene* diproduksi oleh negara asing. Karena kandungan nikotin yang terdapat pada rokok putih dinilai lebih rendah dari rokok kretek, sedangkan kekhasan rokok kretek Indonesia justru karena bahan campuran yang ditambahkan dengan cengkeh dan rempah lain (Widjaya, 2012). Peraturan Pemerintah ini juga dinilai oleh Salamuddin Daeng dari AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia) hanya mengatur lebih ketat produksi tembakau petani dalam negeri dan tidak mengatur batasan impor tembakau yang saat ini dikhawatirkan akan merusak harga tembakau nasional (Khaerudin, 2013).

Selain peraturan pemerintah yang akhir-akhir ini cenderung tidak membela kepentingan kalangan petani, hal lain yang mengubah pola strategi penghidupan dan peta kesejahteraan petani adalah hilangnya *social capital* dan munculnya sifat individualistik dalam pribadi masyarakat. Munculnya rentenir di sekitar petani setidaknya bisa menjadi penguat statemen tersebut. Petani merasa setelah mendapat modal dari rentenir, kehidupan mereka akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Meskipun mereka tahu pasti bahwa hasil panennya untuk melunasi hutang dan bunga pinjaman. Pilihan ini terpaksa diambil karena mereka merasa belum ada kucuran dana dari pemerintah atau pihak lain yang meringankan beban mereka.

Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa yang termasuk kategori kaya di daerah produksi tembakau bukanlah petani, tetapi para pedagang atau tengkulak yang lebih mudah dalam berhubungan langsung ke gudang atau pabrik rokok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian bahwa petani tembakau termasuk kategori petani yang belum sejahtera. Dalam situs resmi YLKI terungkap, hasil riset Lembaga Demografi –FE UI bekerjasama dengan *Tobacco Control Support Center* atau IAKMI pada tahun 2008 menyatakan bahwa keadaan petani tembakau tidak semakmur yang dipersepsikan selama ini. Dari upah rata-rata petani maupun buruh yang didapatkan dari data hanya sekitar Rp 413.374 per bulan, ini berarti hanya setengah dari upah rata-rata nasional yaitu Rp 883.693 per bulan (YLKI, 2011).

Penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2011 di Temanggung oleh LP3M UMM mengungkapkan bahwa petani tembakau berkelimpahan materi hanya ketika panen tembakau. Setelah masa panen berlalu, ternyata petani kembali kepada kondisi awal atau tidak berlimpah materi. Petani mendapat kemakmuran ternyata bukan dari panen tembakau, melainkan ditopang oleh pekerjaan lain (UMMGL, 2012).

Melihat data dan empiris yang ada, seharusnya petani tembakau mendapat perhatian khusus, karena mereka adalah bagian penting aktor penghasil pendapatan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian) dan pihak-pihak yang peduli nasib petani tembakau adalah membentuk dan mendirikan wadah bagi petani tembakau yang dinamai Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Harapannya dengan adanya wadah ini, petani

tembakau dapat lebih sejahtera kehidupannya melalui program pemberdayaan.

APTI konsisten pada perjuangan untuk mendorong pencapaian harga tembakau lebih tinggi dari biaya produksi, sehingga petani tidak selalu rugi setiap kali panen. Program utama APTI fokus pada peningkatan kualitas kehidupan petani tembakau dengan harapan muncul kemandirian petani tembakau. Keberhasilan pemberdayaan oleh APTI bergantung peran *stakeholder*, karena pemberdayaan merupakan proses tindakan yang panjang dan memerlukan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat meliputi pemerintah, petani tembakau dan APTI.

Terkait dengan proses pemberdayaan petani tembakau, APTI adalah penghubung antara petani dengan pemerintah. Komunikasi APTI kepada pemerintah, di antaranya adalah menyampaikan pesan petani tembakau bahwa mereka merasa dirugikan dengan adanya PP Tembakau No.109 tahun 2012. Bentuk komunikasi APTI adalah melalui audiensi langsung dengan DPR, Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait, lainnya melalui demonstrasi yang melibatkan peran langsung masyarakat petani tembakau.

Melihat keterlibatan aktif APTI dalam pemberdayaan petani, maka dapat dikatakan APTI dimaknai sebagai bagian dari proses menuju keadaan lebih baik dan lebih maju. Setiap program pemberdayaan yang dilakukan APTI adalah usaha untuk mengantarkan petani kepada keadaan yang lebih berdaya dan sejahtera. Isu pemberdayaan masyarakat petani tembakau menjadi isu yang strategis, karena jika pemberdayaan petani berhasil, hal ini akan menentukan tingkat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu penting untuk diteliti dan

dikaji bagaimana bentuk dan mekanisme pemberdayaan yang diinisiasi oleh APTI Temanggung sebagai upaya mendukung ketahanan ekonomi petani tembakau di Temanggung.

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa landasan teori, yang secara rinci diuraikan di bawah ini.

Pertama, paradigma *Development Support Communication (DSC)*. Paradigma pembangunan senantiasa mengalami perubahan. Konsep modernisasi sempat menjadi pegangan utama hampir di semua negara. Namun ternyata paradigma modernisasi banyak menilai gagal karena tidak bisa menyelesaikan problem pembangunan yang bersifat non fisik. Kemudian muncul paradigma baru yaitu pemberdayaan menjawab beberapa problem pembangunan yang tidak terselesaikan oleh paradigma modernisasi.

Development support communication adalah model dalam proses pemberdayaan masyarakat. Melkote & Steeves (2001) menyebutkan bahwa DSC mempunyai karakteristik yaitu secara struktur bersifat horisontal, partisipatoris, berada pada level masyarakat bawah dan lokal dengan maksud agar saling memahami. Jumrana (2012) menyatakan bahwa agen DSC pada mulanya adalah fasilitator, kolaborator dan membantu masyarakat untuk mengakses sumberdaya serta memecahkan permasalahan mereka. Dengan peran ini agen DSC mempunyai cukup besar campur tangan. Model DSC memusatkan pada pengembangan komunikasi antara pemerintah dengan *society* (Melkote, 2001). Komunikator sebagai penengah antara aktor dan rakyat, sehingga informasi yang tak seimbang dapat direduksi.

Paradigma DSC sesuai dengan kinerja obyek penelitian ini yaitu APTI. APTI merupakan komunikator dalam konsep DSC yang berfungsi sebagai wadah untuk pemberdayaan petani tembakau. Dengan demikian APTI adalah mediator antara aktor atau pemrakarsa di bidang pembangunan khususnya pertanian tembakau dengan petani tembakau yang bertugas sebagai fasilitator dalam pemberdayaan.

Kedua, bonafide group theory. Menurut Kartono (2001) kelompok adalah kumpulan dua atau lebih individu yang kehadirannya masing-masing individu memiliki arti dan nilai bagi individu lainnya satu sama lain. Arti dan nilai individu akan terwujud jika terjadi interaksi guna meraih tujuan bersama. Interaksi dalam kelompok membutuhkan komunikasi yang dinamakan komunikasi kelompok.

Salah satu teori dalam komunikasi, khususnya komunikasi kelompok adalah *bonafide group theory* atau teori kelompok terpercaya. Teori ini berada pada tradisi sibernetik dan dikemukakan oleh Linda Putnam dan Cynthia Stohl (1990). Teori ini menguraikan bahwasanya kelompok mempunyai 2 sifat, yaitu mempunyai batas yang dapat ditembus dan berkarakter *interdependent* dengan lingkungan. Terkadang *in-group* ataupun *out-group* hampir tidak terlihat perbedaannya. Selain itu, menurut teori ini bahwa manusia tidak tertutup dengan adanya kelompok lain dan mengakibatkan manusia tidak memiliki komitmen yang sama dalam sebuah kelompok (Littlejohn & Foss, 2008)

Teori ini juga menjelaskan bahwa interaksi antara kelompok satu dengan yang lainnya berakibat kerjasama atau konflik. Jika antara satu group dengan yang lain saling dapat mengerti

akan kebutuhan kelompok lain maka akan terjadi kerjasama, jika tidak maka akan menjadi sebuah konflik. Untuk itulah penting merencanakan sebuah strategi komunikasi agar tumbuh kerjasama antar kelompok. Teori ini dipakai sebagai alat analisis karakter APTI sebagai asosiasi atau kelompok yang mempunyai anggota dengan loyalitas yang berbeda-beda dan APTI sebagai asosiasi yang saling bergantung dengan kelompok lain dalam menjalankan fungsi pemberdayaan.

Ketiga, pemberdayaan petani. Pembangunan yang dikuasai oleh negara terbukti gagal diterapkan pada beberapa negara, maka alternatif pembangunan membutuhkan kekuatan dari masyarakat. Adi (2008) menyatakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan langkah pemberdayaan dan juga membangun manusia itu sendiri.

Konsep pembangunan yang berorientasi pada manusia masih sering disalahartikan sebagai pembangunan ekonomi dan fisik saja, padahal seharusnya pembangunan ini juga memperhatikan aspek sosial maupun spiritual masyarakat. Dalam arti lain, pembangunan berbasis pada manusia adalah pembangunan dengan melihat manusia secara utuh meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan politiknya. Konsep pembangunan ini bisa dijelaskan pula dengan memanfaatkan pendekatan demokrasi.

Salah satu konsep demokrasi adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat dapat digunakan dalam konsep pembangunan dan komunikasi, sehingga diperoleh pengertian pembangunan komunikasi sebagai langkah peningkatan level demokrasi ekonomi (tenaga kerja yang produktif), demokrasi politik (partisipasi dan akses), demokrasi sosial

(perluasan kesempatan), dan demokrasi budaya (pluralisme) (Tehrani, 1994).

Rumitnya masalah pembangunan menyebabkan para ilmuwan mencoba mencari alternatif, salah satunya adalah pemberdayaan. Masalah pembangunan menurut (Melkote & Steeves, 2001) adalah ketidakadilan kekuasaan yang ditafsirkan sebagai ketidakadilan kekuasaan pada sisi sosial ekonomi. Sementara kondisi masyarakat lemah cenderung tertindas dari banyak sisi, baik ekonomi, sosial, politik bahkan budaya. Masalah pembangunan dalam teori komunikasi pembangunan terbaru nampak pada kurangnya pembagian kekuasaan politik, ekonomi dan budaya. Masyarakat pada umumnya tidak mempunyai akses pendidikan, bantuan teknis, kesehatan dan perumahan yang layak.

Kondisi ketidakberdayaan banyak dialami oleh lapisan masyarakat miskin, termasuk petani tembakau. Tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang lemah membuat mereka patuh pada penguasa, seperti terpaksa meminjam uang kepada rentenir atau menjual tembakaunya dengan harga murah. Karenanya mereka perlu menjauh sesuai dengan konsep pemberdayaan yaitu gerakan menjauh dari sistem dominasi dan mereduksi ketergantungan dan intervensi dari negara atau penguasa (Ryan, 2010).

Gerakan menjauh ini tidak melulu pada bantuan pihak luar. Tetapi memerlukan kesadaran dari dalam individu yang bersangkutan. Dengan kata lain pemberdayaan akan gagal jika hanya mengandalkan peran fasilitator atau orang lain. Pemberdayaan memerlukan peran aktif dari psikologis seseorang yang ingin berdaya. Pentingnya dorongan ini menurut McClelland (1961) dituangkan dalam teori *n-Ach* atau *need for achievement*. Menurutnya, kegagalan

pembangunan masyarakat disebabkan masyarakat yang bersangkutan tidak mempunyai dorongan untuk berprestasi atau tidak mempunyai *n-Ach*. Masyarakat bersikap pasrah dan tanpa perlawanan.

Menurut teori ini, agar pembangunan berhasil maka sikap masyarakat harus diubah dan didorong untuk memiliki *n-Ach*. Salah satu cara yang diajukan dalam teori ini adalah dengan mendidik masyarakat, di samping mengubah sikap pasrah menjadi sikap berani melawan nasib. Pendidikan atau pemberdayaan masyarakat ini dapat berlangsung pada level komunitas dan level individu.

Melkote menjelaskan bahwa pada level kelompok, pemberdayaan dimaknai sebagai proses bertambahnya pengawasan dan kesadaran kelompok terhadap hal-hal yang urgen bagi anggota kelompok atau komunitas (Fawcett dkk, 1984 dalam Melkote 2001). Pada level individu pemberdayaan dimaknai sebagai pengendalian diri atas pengaruh sosial (Rappaport, 1987).

Pandangan di atas menguatkan dugaan bahwa pemberdayaan yang ideal seharusnya dilaksanakan pada level individu maupun kelompok. Pada level individu masyarakat dituntut bangun dan bergerak untuk merubah hidupnya menjadi sejahtera. Pada level kelompok, masyarakat yang bertekad untuk lebih berdaya dapat memungkinkan terciptanya basis masyarakat yang kuat dan efektif.

Hopson & Scally (1995) dalam Adi (2008) melihat pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang terus berjalan sepanjang usia manusia yang berasal dari pengalaman individu tersebut dan bukan proses yang berhenti pada saat tertentu. Hal ini berlaku pada level kelompok, dimana pemberdayaan itu akan eksis dan ajeg selama komunitas itu terus bergerak untuk memberdayakan diri

mereka.

Pemberdayaan perlu kontinyu sebagai satu proses berkesinambungan. Hogan (2000:20) dalam Adi (2008) mendiskripsikan proses pemberdayaan sebagai lima tahapan siklus, yaitu (a). menyadari kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan; (b). membahas alasan terjadinya pemberdayaan dan penidakberdayaan; (c). mengidentifikasi masalah ataupun proyek; (d). mengidentifikasi sumber daya untuk mensupport perubahan; (e). mengembangkan perencanaan dan mengimplementasikannya.

Rangkuman dari beberapa konsep pemberdayaan yang telah diuraikan di atas secara lengkap dikemukakan oleh beberapa ahli dari *Cornell University Empowerment Group*. Mereka menjelaskan pemberdayaan sebagai tindakan yang disengaja, berkelanjutan, fokus pada komunitas setempat yang melibatkan refleksi kritis, saling menghormati, saling peduli dan keikutsertaan kelompok untuk mendapatkan akses, serta kontrol yang besar terhadap sumber daya yang tersedia (Rappaport, 1995).

Senada dengan definisi sebelumnya, Subejo dan Supriyanto (2004) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal untuk mengelola segala *resources* yang dipunyai melalui tindakan bersama dan *networking*, sehingga melahirkan kemampuan dan mandiri secara ekonomi sosial maupun ekologi. Turunan konsep di atas memunculkan definisi tentang pemberdayaan petani khususnya petani tembakau sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka meningkatkan kemampuan petani tembakau, sehingga dapat berdiri sendiri, mampu memaksimalkan diri dan usahanya secara kontinyu. Pemberdayaan dapat diusahakan melalui dinamika kelompok APTI sehingga

mereka memperoleh pelatihan pengelolaan usaha tani, mendapat perlindungan dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses bantuan usaha melalui Bank.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan strategi *embedded* konkuren (kualitatif dan kuantitatif). Menurut Creswell (2007), strategi ini mengkombinasikan metode kualitatif dengan metode kuantitatif secara bersamaan tetapi presentase metodenya berbeda. Metode primer (kualitatif) dipergunakan untuk mendapatkan data utama, sedangkan metode sekunder (kuantitatif) dipakai untuk mendukung data yang didapat dari hasil metode primer (kualitatif).

Pendekatan penelitian secara kualitatif dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan

masalah yang dibahas (Bungin, 2010). Selain itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan mencocokkan keadaan empiris dengan teori menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2004). Pendekatan kuantitatif penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu pendekatan yang menggunakan statistik untuk mendeskripsikan keadaan atau masalah, sehingga lebih mudah dipahami. Tanpa statistik deskriptif, maka data yang tersaji akan terlalu besar, sehingga tidak akan bermakna apapun serta tidak dapat dijelaskan (Abu Samah & Suandi, 1999).

PEMBAHASAN

Kondisi Umum Petani Tembakau Temanggung

Pertanian tembakau secara historis cukup mewarnai kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tani di Kabupaten Temanggung.

Tabel 1
Persentase Jenis Mata Pencarian Penduduk di Kab. Temanggung (2010)

No	Jenis mata pencarian	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	228.915	54,78
2	Perdagangan	65.892	15,77
3	Jasa	46.911	11,22
4	Industri	33.945	8,12
5	Bangunan	21.357	5,11
6	Pengangkutan	12.478	2,99
7	Lain-lain	8.388	2,01
Jumlah		417.886	100

Sumber : Analisis data primer (diolah dari BPS Kabupaten Temanggung, 2011)

Tabel 2
Persentase Luas Lahan Perkebunan di Kab. Temanggung (2010)

No	Tanaman perkebunan rakyat	Luas lahan (ha)	Persentase (%)
1	Kopi arabika	1.160,57	3,40
2	Kopi robusta	8.919,73	26,15
3	Cengkeh	1.308,06	3,84
4	Kelapa	1.960,62	5,75
5	Tembakau	14.537,00	42,63
6	Melinjo	4.295,26	12,59
7	11 tanaman yang lain	1.922,36	5,64
Jumlah		34.103,6	100

Sumber : Analisis data primer (diolah dari BPS Kabupaten Temanggung, 2011)

Areal pertanian untuk tembakau di Temanggung per tahun rerata lebih dari 11.000 hektar yang terdapat hampir di 14 wilayah kecamatan dengan rerata tingkat produksi sebesar 5000 ton tembakau tiap tahun. Luas areal tembakau di Temanggung hampir sama dengan 31% produksi tembakau di Propinsi Jawa Tengah. Angka tersebut sama dengan 3,75% dari total produksi tanaman tembakau se-Indonesia., sehingga mayoritas penduduk Temanggung berpecaharian sebagai petani tembakau. Ada sekitar 48.000 kepala keluarga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bisnis komoditas tembakau yang meliputi petani, pengering, pengrajin rokok kretek skala rumahan, pengrajin rokok cerutu dan perajang cengkeh. Gambaran kuantitatif mengenai jenis pecaharian penduduk dan luas lahan pertanian yang digunakan untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan mata pecaharian utama mayoritas penduduk Kabupaten Temanggung bekerja di bidang pertanian (54,78 %) dan lahan perkebunan yang paling luas digunakan untuk tanaman tembakau (42,63 %).

Tembakau Sebagai Komoditas Strategis Pertanian Temanggung

Areal pertanian di Kabupaten Temanggung rata-rata adalah lahan kering. Hal ini mengakibatkan masyarakat petani Temanggung banyak tergantung pada tanaman perkebunan. Di antara sekian tanaman pertanian, tanaman utama komoditas daerah adalah tembakau, sehingga dapat dikatakan tembakau adalah komoditas unggulan Kabupaten Temanggung. Tembakau Temanggung mempunyai spesifikasi rasa,

bau atau aroma, tekstur yang berbeda dengan yang lain dan merupakan bahan utama industri rokok kretek di Indonesia. Luas areal tembakau Temanggung berkisar sembilan belas ribu hektar dan jumlah petani yang mengandalkan kehidupannya dari tembakau sekitar 57.000 jiwa. Hampir sebagian besar wilayah Temanggung cocok untuk ditanami tembakau.

Data pada bulan Desember 2012 dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) menyebutkan luasan lahan tembakau Kabupaten Temanggung adalah 15.587,5 hektar dan jumlah masyarakat petani tembakau riil sebanyak 51.958 jiwa. Jika di rata-rata, maka kepemilikan lahan tembakau di Temanggung termasuk cukup tinggi yaitu 0,3 hektar.

Usaha tani tembakau bersifat khusus karena pasarnya terbatas hanya untuk industri rokok. Pembeli tembakau Temanggung yang utama selama ini adalah Pabrik Rokok (PR) Gudang Garam (GG) dan PR Djarum. Industri rokok kretek lain yang juga menggunakan tembakau Temanggung adalah PR. Bentoel, PR Sukun, PR Noyorono, PR Jambu Bol, dan beberapa pabrik lainnya. Selama ini tembakau Temanggung diproduksi oleh banyak (ribuan) petani, sehingga pasar perniagaan tembakau di Temanggung bersifat oligopsoni.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya posisi tawar petani karena dalam pembelian tembakau, industri rokok pada umumnya menggunakan orang-orang kepercayaan sebagai perantara. Dengan demikian rantai dagang tembakau di Temanggung menjadi semakin panjang dan semakin memangkas keuntungan petani. Oleh karena itu keberadaan kelompok tani dan asosiasi di bidang pertembakauan, khususnya di Temanggung perlu dikembangkan agar

berperan secara optimal, terutama dalam menjembatani antara petani dengan industri, khususnya dalam membela dan memajukan kehidupan petani.

Bentuk Dan Mekanisme Program Pemberdayaan APTI

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) adalah organisasi profesi dengan ruang lingkup daerah, merdeka, mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan profesi dan fungsi di bidang pertembakauan. Definisi tersebut sesuai dengan AD/ART APTI yang ditetapkan melalui Munas 2008 di Ungaran. Dalam sejarahnya, organisasi ini didirikan dan diresmikan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Tanaman Semusim pada tahun 2000. Pada awal setelah dibentuk, kepengurusan organisasi dipilih langsung oleh pemerintah.

Setelah hadirnya APTI nasional, selanjutnya disusul dengan berdirinya beberapa APTI perwakilan daerah (DPD). Sampai sekarang sudah berdiri enam (6) DPD APTI yang berada di enam (6) propinsi yaitu Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. APTI Temanggung adalah cabang (DPC) dari APTI DPD Jawa Tengah. Sebelum bergabung dengan APTI, organisasi pergerakan petani Temanggung bernama Persatuan Petani Temanggung Sindoro Sumbing (PPTSS). PPTSS hanya bersifat teritorial yaitu beranggotakan petani tembakau wilayah Temanggung saja, oleh karena itu untuk memperluas wilayah perjuangan mereka memutuskan bergabung atau melebur dengan APTI pada tahun 2008. Selain itu, keputusan untuk bergabung dengan APTI dikarenakan adanya hantaman terhadap kepentingan petani tembakau melalui

regulasi yang cukup memberatkan petani tembakau.

Sesuai visi dan misi organisasi, semua tindakan APTI diarahkan untuk memberdayakan petani tembakau. Dalam teori pemberdayaan Rappaport (1987), pemberdayaan secara individu didefinisikan sebagai pengendalian pribadi atau perasaan secara psikologis atas pengaruh sosial, politik dan hukum. Ini berarti setiap petani memiliki hak untuk mempengaruhi kehidupan sosial, hukum maupun politik dimana petani itu berada. Mereka mampu mengendalikan keputusan yang berlaku untuk dirinya tanpa terpaksa.

Sementara itu, kondisi di lapangan mengindikasikan bahwa petani tembakau di Kabupaten Temanggung masih kurang berdaya. Berdasarkan temuan data pada saat *pre survey* (2012) diketahui bahwa keterpurukan atau ketidakberdayaan mereka dikarenakan oleh sebab internal dan eksternal. Faktor internal diri petani dipengaruhi oleh perilaku tidak jujur, minimnya tingkat pengetahuan tentang budidaya tembakau yang berkualitas, rendahnya kepedulian terhadap pendidikan, dan ketergantungan terhadap rentenir. Secara eksternal, keterpurukan petani dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah, di antaranya adalah PP No. 109 tahun 2012 dan sistem perniagaan tembakau yang menyebabkan petani tergantung pada pabrikan.

Berdasar kondisi tersebut, APTI berinisiatif membuat program pemberdayaan, terutama pemberdayaan dalam aspek perilaku petani (internal). Selama ini petani cenderung bermain curang dan melakukan praktik bisnis yang tidak *fair* karena ingin meraup keuntungan yang besar. Mereka banyak mencampur tembakau dengan bahan-bahan lain atau tembakau kualitas rendah. Akibatnya

bukan laba yang mereka dapat tapi justru kerugian, karena pihak pedagang dan pabrik pasti mengetahui kecurangan tersebut. Akibatnya banyak tembakau mereka yang dihargai rendah bahkan ditolak.

Hal ini sebenarnya sudah sering diingatkan oleh pihak pemerintah, seperti dikemukakan Kepala Dintanbunhut, Ronny Nurhastuti bahwa pabrik rokok hanya akan menerima tembakau yang unggul atau berkualitas (Pekab Temanggung, 2012). Tetapi petani bahkan pedagang yang nakal tetap saja ada yang memilih jalan curang. Dari sini APTI mengambil peran dengan memberikan pelatihan terhadap petani tembakau terkait dengan penanaman tembakau berkualitas. Hal inilah yang banyak dilakukan oleh APTI. Program ini melibatkan banyak pihak, yang paling utama adalah agen saprodi yaitu memberi penyuluhan terkait dengan bibit dan pengolahan tembakau berkualitas.

Usaha lain untuk melepaskan petani dari jeratan rentenir, APTI melakukan kemitraan dengan Bank Mandiri melalui Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT) yang memberikan bantuan pinjaman dengan bunga 1.5%. Meskipun masih tinggi, tapi besaran bunga tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan bunga dari rentenir. Sementara itu, program penyadaran tentang urgensi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan petani dan buruh tani dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada anak petani yang berprestasi mulai dari SLTP.

Secara rinci berikut adalah program-program pemberdayaan yang berhasil dibentuk dan dilaksanakan APTI Temanggung guna mendukung ketahanan ekonomi, yaitu (a) program pemberdayaan APTI DPD Jateng peduli pendidikan, (b) program Kredit Usaha

Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), (c) program pembimbingan pembinaan dan pendampingan petani tembakau, dan (d) program pemberdayaan utama APTI adalah advokasi regulasi pertembakauan. Semua bentuk pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung adalah fasilitasi dengan mekanisme tiap program berbeda-beda.

Program APTI DPD Jateng Peduli Pendidikan dilakukan dengan mekanisme pihak APTI mendatangi SMP dan MTS di seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung untuk menawarkan program dan meminta pihak sekolah untuk memberikan 10 nama calon siswa penerima beasiswa dari siswa kelas 3 SMP. Beasiswa diberikan sebagai bantuan biaya pendidikan tingkat SMU. Ketentuan nama-nama yang dikirimkan adalah mempunyai prestasi di kelas dan anak dari petani tembakau yang tidak mampu. Kemudian APTI mengolah nama-nama kandidat tersebut untuk dicek keadaan mereka yang sebenarnya.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi ke anak-anak penerima beasiswa yang lolos pada tahap pertama, kemudian dilakukan tes penjurangan berupa tes akademik, mengisi angket dan blanko pendaftaran. Setelah itu APTI mengumumkan hasil tes untuk menentukan lolos tidaknya kandidat dan tahap terakhir adalah evaluasi. Pihak yang terkait dalam program ini adalah Djarum Foundation dan APTI Temanggung.

Sementara itu, mekanisme program KUMPT dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahapan pengajuan, pencairan dan pengembalian. Semua tahapan mekanisme tersebut dilakukan secara berkelompok, dan ketua kelompok yang dipilih adalah petani atau pedagang yang mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Gudang Garam. Pihak yang terlibat pada

program KUMPT adalah Gudang Garam, Bank Mandiri, APTI Temanggung.

Selanjutnya untuk mekanisme program program pembimbingan, pembinaan dan pendampingan petani tembakau, APTI Temanggung menggandeng agen saprodi yaitu Saprotan Utama. Hal ini ditempuh karena minimnya sumber dana yang dimiliki oleh APTI dan Saprotan Utama dinilai oleh APTI menguasai bidang pertembakauan. Selain itu, hal ini juga untuk memainkan peran APTI Temanggung sebagai mediator antara pihak-pihak yang ahli di bidang pertembakauan dengan petani tembakau. Dikarenakan bermitra dengan Saprotan Utama, segala bentuk materi penyuluhan dan tenaga penyuluh berasal dari pihak Saprotan Utama.

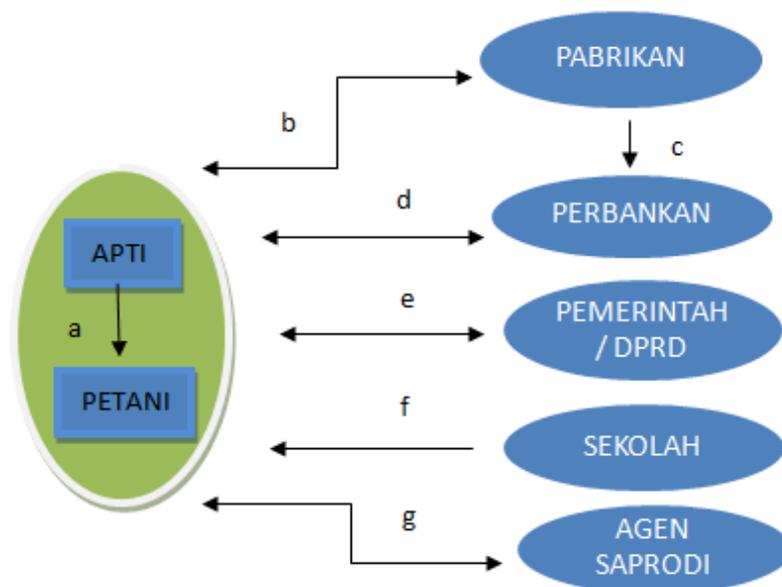
Mekanisme program advokasi regulasi pertembakauan dimulai dengan rapat koordinasi membahas masalah terkait regulasi pertembakauan. Selanjutnya, koordinasi membahas isu tersebut disebarkan mulai dari

kecamatan sampai dengan tingkat desa, baru kemudian dilakukan aksi massa dengan media demonstrasi.

Bentuk dan mekanisme yang dilakukan oleh APTI Temanggung membawa beberapa konsekuensi positif bagi masyarakat petani anggota APTI. Bagi petani yang mempunyai anak usia SMP yang berprestasi, program beasiswa besar pengaruhnya dalam hal mengurangi beban biaya sekolah. Sedangkan bagi petani yang lain, pinjaman dari KUMPT cukup meringankan mereka dari jeratan renternir.

Meskipun APTI secara umum sudah merasa melakukan pemberdayaan yang maksimal, tetapi banyak pula anggota yang merasa tidak puas karena mereka melihat apa yang dikerjakan APTI masih jauh dari visi misi organisasi. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut *bonafide group theory*, masing masing anggota kelompok mempunyai pandangan tersendiri atas organisasi yang mereka ikuti.

Gambar 1
Bentuk Dan Mekanisme Keterkaitan Antar Aktor Pemberdayaan Petani Tembakau



Sumber : Analisis data primer (2013)

Keterangan:

- (1) APTI Temanggung memberikan pemberdayaan kepada petani tembakau dengan memfasilitasi petani untuk mengakses dana Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), menjadi jembatan antara petani dengan pabrikan, grader/sub grader, pemerintah/DPRD, sekolah dan agen saprodi.
- (2) APTI melobi pabrikan untuk membeli semua hasil panen tembakau petani dengan harga yang sesuai, pabrikan membeli tembakau petani melalui grader/sub grader. Pabrikan dalam hal ini PR Gudang Garam memberi rekomendasi pada petani agar dapat mengakses modal KUMPT
- (3) Pabrikan menjadi penjamin kepada pihak Perbankan, dalam hal ini Bank Mandiri agar mau memberi pinjaman melalui KUMPT
- (4) Perbankan (Bank Mandiri) memberikan pinjaman berupa dana KUMPT, APTI memfasilitasi petani untuk dapat mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri.
- (5) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dikelola oleh Pemerintah dan DPRD diantaranya dengan mengalokasikan dana untuk pemberdayaan petani tembakau melalui APTI.
- (6) Sekolah (SLTP) memberikan data siswa kandidat penerima beasiswa APTI dari *Djarum Foundation* dan sekolah (SMU) mengawasi perilaku penerima beasiswa
- (7) APTI dan agen saprodi dalam hal ini Saprotan Utama bermitra dalam program pemberdayaan APTI. Saprotan Utama memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang tembakau berkualitas.

Pihak Dan Mekanisme Keterkaitan Dalam Pemberdayaan Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi

Pemberdayaan petani tembakau di Kabupaten Temanggung telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak. Beberapa *stakeholder* dalam proses pemberdayaan petani tembakau meliputi APTI, sekolah, pemerintah daerah, DPRD, agen saprodi, grader/sub grader, pabrikan dan perbankan. Penelitian ini fokus mengkaji pemberdayaan yang diupayakan oleh APTI Temanggung, baik bentuk, mekanisme, pihak yang berperan sebagai aktor maupun strategi komunikasi yang digunakan dalam program pemberdayaannya. Bentuk dan mekanisme keterkaitan antar aktor dalam pemberdayaan petani tembakau dapat dilihat pada gambar 1.

Pemberdayaan melalui advokasi petani cukup banyak memberikan perubahan signifikan terhadap kemandirian petani tembakau. Meskipun sebagian petani menganggap bahwa advokasi yang sarat dengan politik menjadikan alasan sebagian petani tembakau tidak mau bergabung dengan APTI, tetapi sebagian petani justru tertarik untuk bergabung dengan APTI agar kepentingan mereka dapat diperjuangkan. Petani yang tidak mau bergabung menilai bahwa apa yang diperjuangkan APTI melalui advokasi pertembakauan adalah kepentingan pabrik, bukan kepentingan petani. Hal ini dikarenakan pengurus APTI cenderung eksklusif dalam melakukan gerakan advokasi. Mereka hanya melibatkan petani pada hal-hal teknis seperti demonstrasi, sehingga muncul spekulasi bahwa mereka hanya diperalat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan White (2004), bahwa masalah pembangunan salah satunya adalah kurangnya pembagian kekuasaan politik atau dalam hal ini dapat

dikatakan sebagai akses politik. Oleh karena itu, salah satu tugas APTI ke depan adalah memberi pendidikan politik khususnya ekonomi politik pertembakauan kepada petani agar ketertarikan untuk bergabung ke dalam wadah APTI semakin besar.

Hal lain yang dapat dilihat pada gambar 1 tentang keterkaitan semua pihak yang terlibat dalam proses memberdayakan petani adalah fakta bahwa banyaknya pihak yang terlibat sedikit banyak memberi hasil atas upaya pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung. Seperti pemberian pinjaman melalui KUMPT, program ini diharapkan mampu memberi dampak kemandirian bagi petani tembakau. Kondisi di lapangan terlihat petani tembakau banyak yang mulai beralih memanfaatkan kredit dari KUMPT ketika memulai tanam tembakau. Dilihat dari sisi ketahanan ekonomi individu petani dapat dikatakan petani tembakau sudah mampu untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pinjaman berbunga dari renternir.

Secara konsep, ketahanan ekonomi individu petani dapat diturunkan dari konsep ketahanan ekonomi keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menurut Wulandari (2017) adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang berisi sifat ulet dan tangguh, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi tantangan, ancaman dan hambatan serta gangguan yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung dan tidak langsung yang membahayakan kehidupan ekonomi keluarga. Dengan demikian ketahanan ekonomi petani dapat dikatakan salah satunya sebagai kemampuan untuk menghadapi ancaman dan tantangan dari dalam dan luar diri petani yang akan membahayakan ekonomi petani. Kemandirian

petani untuk tidak bergantung pada renternir dikatakan meningkat dan hal ini mendukung terbentuknya ketahanan ekonomi pada diri petani.

Demikian halnya dengan program pemberian beasiswa kepada anak petani yang kurang mampu, secara umum hal tersebut dapat mendukung ketahanan ekonomi petani. Selama ini, banyak alasan dari petani untuk tidak menyekolahkan anaknya karena masalah biaya. Salah satu program APTI untuk memberi beasiswa dapat dikatakan menjadi salah satu upaya petani tembakau untuk menghadapi hambatan dari dalam diri mereka sendiri terkait ketidakmampuan membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Biaya sekolah yang awalnya menjadi ancaman ekonomi bagi petani, sekarang bukan lagi menjadi ancaman karena terselesaikan dengan adanya program beasiswa dari APTI.

Namun demikian, meskipun secara umum program APTI dapat mendukung ketahanan ekonomi petani tembakau, tetapi beberapa hal masih perlu untuk dilakukan agar pemberdayaan berjalan maksimal. Contohnya adalah semangat untuk menabung ketika panen, kemudian menggunakan tabungan tersebut untuk modal tanam tahun berikutnya masih belum berjalan maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran individu atas pengaruh sosial seperti yang diungkapkan Rapaport (1987) tentang makna pemberdayaan belum terbentuk maksimal pada diri petani tembakau.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) adalah organisasi non pemerintah yang berdiri karena kesamaan

tujuan antar anggota yaitu meningkatkan kehidupan petani tembakau menjadi sejahtera. Dinamika perjalanannya APTI dinilai dengan beragam persepsi karena banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan. APTI dipandang sebagai organisasi yang independen. Secara umum, pemberdayaan petani tembakau yang dilakukan APTI Temanggung dipandang oleh para petani tembakau secara kelembagaan telah banyak memberi dampak positif bagi anggota, tetapi kemandirian secara individu petani tembakau yang mengarah pada ketahanan sosial ekonomi masih relatif rendah.

Kedua, bentuk pemberdayaan petani tembakau yang dilakukan APTI Temanggung pada semua program pemberdayaan dapat dikategorikan sebagai fasilitasi dengan mekanisme pada masing-masing program berbeda-beda.

Ketiga, program-program pemberdayaan yang berhasil dibentuk dan dilaksanakan APTI Temanggung secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: (a) program pemberdayaan APTI DPD Jateng peduli pendidikan, (b) program Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), (c) program pembimbingan pembinaan dan pendampingan petani tembakau, dan (d) program pemberdayaan utama APTI adalah advokasi regulasi pertembakauan. Semua bentuk pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung adalah fasilitasi dengan mekanisme tiap program berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Abu-Samah, B. & T. Suandi. 1999. *Statistics For Social Research with Computer Application*. Universiti Putra Malaysia. Malaysia.

Adi, I.R. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya*

Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.: PT.Rajagrafindo Persada.

BPS Kabupaten Temanggung, 2011, *Kabupaten Temanggung Dalam Angka*.

Bungin, B. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Creswell, J.W & V.L.P Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publication. USA

Jumrana. 2012. "Penguatan Dimensi Komunikasi untuk Perubahan Sosial dalam Desain Perencanaan Pembangunan". *Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi, Edisi III*, Januari 2012

Kartono, K. 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Khaerudin, (2013) Petani Tembakau Dihambat, Impor tak Dihalangi, Kompas diunduh melalui <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/10/1427333/Petani.Tembakau.Dihambat.Impor.Tak.Dihalangi> diakses pada 16 Januari 2013

Littlejohn, S.W.& K.A. Foss. 2008. *Theories of Human Communication*. Ninth edition. Thomson Wadsworth. USA

Mc Clelland, D.C. 1961. *The Achieving Society: An Adaptation*. Vakils Feffer and Private Simons. Bombay

Melkote, S.R. & H.L. Steeves (2001) "Communication Strategies for Empowerment" dalam *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*, 2nd Edition. New Delhi: Sage Publicaton – London: Thousand Oaks

Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.

- Pemkab Temanggung, 2012. "Agar Dibeli Pabrik, Petani Diminta Jaga Kualitas Tembakau". <http://www.temanggungkab.go.id/detailberita.php?bid=25> diakses pada 31 Juli 2012
- , 2012. "RPP Tembakau Ditolak Petani". <http://www.temanggungkab.go.id/detailberita.php?bid=1204> diakses pada 31 Juli 2012
- Rappaport, J. 1987. Toward a Theory for Community Psychology terms of Empowerment. *American Journal of Community Psychology*. Vol 15, No. 2, 1987 <http://download.springer.com/static/pdf/>
- , 1995. Empowerment meets narrative: Listening to stories and creating settings. *American Journal of Community Psychology*. Vol 23, No.5 hal.795 Research Library Core <http://dpss.psy.unipd.it/link/files/3Rappaport.1995.Empowerment.meets.narrative.AJCP1.pdf>
- Ryan, K. 2010. Governing the Future: Citizenship as Technology, Empowerment as Technique. *Jurnal Critical Sociology* 37(6)763-778 www.crs.segepub.com/content/37/6/763 diunduh pada 18 Oktober 2012
- Slamet, M, 1995. *Sumbang Saran Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Subejo & Supriyanto, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah, Disampaikan Pada Stadium General Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan tanggal 16 Mei 2004, DEMA Fakultas Pertanian UGM
- Tehrani, M. 1994. "Communication and Development". in Crowley & Mitchell (Ed). *Communication Theory Today*. Polity Press. UK
- UMMGL, 2012. "Rilis hasil penelitian Kesejahteraan Petani Tembakau di Temanggung", <http://www.ummgl.ac.id/index.php/content/view/271/1/> diakses pada 31 Juli 2012
- Widjaya, A.M, 2012, "RPP Tembakau Sarat Kepentingan Asing", *Republika*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/03/m6kwe0-rpp-tembakau-sarat-kepentingan-asing> diakses pada 31 Juli 2012
- Wulandari, K.P. 2017. "Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.23, No.3, Desember 2017, Hal 300-319 DOI:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.28829>
- YLKI, 2011. "Menelisik Kesejahteraan Petani Tembakau", <http://www.ylki.or.id/menelisik-kesejahteraan-petani-tembakau.html> diunduh pada 31 Juli 2012